

**TINJAUN YURIDIS TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DALAM PENGGUNAAN  
MEDIA TELIVISI SEBAGAI MEDIA KAMPANYE DILIHAT  
DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN**

**ABSTRAK**

Dheny Thompson W.V. Situmorang <sup>1</sup>

H. Suparman, SH, MH <sup>2\*\*</sup>

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn <sup>3\*\*\*</sup>

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Pemilu yang diadakan di Indonesia bertujuan untuk sarana demokrasi, menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mewujudkan tujuan nasional, memilih memilih presiden dan wakil presiden.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana faktor utama calon presiden dan wakil presiden menggunakan media televisi sebagai media kampanye? Bagaimana peranan komisi penyiaran televisi dalam mengawasi stasiun televisi yang menjadi media kampanye? Bagaimana sanksi hukum terhadap media televisi yang lebih memihak terhadap salah satu calon presiden dan wakil presiden

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang kampanye presiden dan wakil presiden menggunakan media televisi sebagai media kampanye

Adapun calon presiden dan wakil presiden menggunakan media televisi sebagai media kampanye adalah sebagai berikut :

Dengan televisi posisi *incumbent* sangatlah berpeluang untuk menjadi figur populer bagi pemilih. Namun di sisi lain bisa menjadi bumerang ketika kinerja dan citra yang terbangun selama kepemimpinannya relatif negatif. Dari segi personal dengan televisi kharisma pribadi terbentuk.

**Kata Kunci : Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, Media Televisi**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>2\*\*</sup> Dosen Pembimbing I, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

<sup>3\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa